

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.

Aziz Syamsuddin. 2013. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang Edisi 2*. Sinar Grafika. Jakarta.

Faisal Abdullah. 2012. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Rangkang Education dan PuKAP. Jakarta.

I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. P.T. Alumni. Bandung.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Setjen dan Kepaniteraan MK-RI. Jakarta.

Mahmuddin Muslim. 2004. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia. Jakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2000. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar Pembentukannya*, Kanisius. Yogyakarta.

Nur Basuki Winanmo. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum Cet V*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

-----, 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Depok.

Refly Harun (dkk.). 2010. *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Pers. Jakarta.

Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia, Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Cetakan ke-2*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SEJENIS**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 P/HUM/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

## **ARTIKEL JURNAL**

Anggiat P. Simamora dan Ramsul Nababan. Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Vol. 3, Nomor 2. 2020.

Dwi Haryati dan Yulianta Saputra. Status Kepegawaian Ideal untuk Penyelidik dan Peyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang Menunjang Penegakan Hukum Anti Korupsi. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, Nomor 1. 2020.

Hanna Nurhaqiqi. Membaca Radikalisme Semu di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK): Analisis Wacana Isu Taliban pada Tubuh KPK. *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 4, Nomor 1. 2021.

Hasanuddin Hasim. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, Vol. 1, Nomor 2. 2017.

Heriyanto dan Sulaiman. Pelatihan Peningkatan *Skill* dan Pengetahuan dalam Menghadapi Tes Seleksi CPNS 2020 di Kota Pontianak. *Jurnal Abdidas*, Vol. 1, Nomor 5. 2020.

Ira Purniawati (dkk.). Pengalihan Status Pegawai Dilingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Analisis Putusan Nomor 28/PUU-XIX/2021). *Jurnal Ikamakum*, Vol. 1, Nomor 2. 2021.

Jovial Falah Parama dan Sholahuddin Al-Fatih. KAJIAN YURIDIS AMBIVALENSI PERGESERAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KE DALAM RUMPUN LEMBAGA EKSEKUTIF. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, Nomor 1. 2020.

- Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya. INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: BENARKAH ADA?. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 4, Nomor 2. 2020.
- Mahrus Ali. Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, Nomor 2. 2017.
- Matius Bangun dan Adi Pradana. Evaluasi Sistem Passing Grade dan Faktor Disparitas Antar Daerah dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). *Jurnal Retentum*, Vol. 1, Nomor 2. 2020.
- Muhammad Junaidi Fitriawan Trisnanda. Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Jurist-Diction*, Vol.4, Nomor 15. 2021.
- Nazaruddin Lathif. Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, Vol. 3, Nomor 1. 2017
- Priskila Fransisca Haryono, Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi, dan Louisa De Marrilac Arianto. Dampak Independensi dan Produk Peraturan Hukum KPK atas Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Hukum "The Jurist"*, Vol. II, Nomor 1. 2018.
- Ricca Anggraeni dan Indah Mutiara Sari. Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum. *Jurnal Crepido*, Vol. 2, Nomor 1. 2020.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Negara Hukum*, Vol. 9, Nomor 1. 2018.

## ARTIKEL INTERNET

[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/lsu%20Sepekan---III-PUSLIT-Mei-2021-187.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/lsu%20Sepekan---III-PUSLIT-Mei-2021-187.pdf), diakses pada 28 November 2021 Pukul 15.23 WITA.

<https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pegawai-kpk-yang-beralih-menjadi-asn>, diakses pada 31 Desember 2021 Pukul 18.08 WITA.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/incasu/>, diakses pada 31 Desember 2021 Pukul 11.36 WITA

<https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2018/11/CAT-TWK-Tes-Wawasan-Kebangsaan.pdf>, diakses pada 17 Desember 2021 Pukul 14.03 WITA.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/16/18543191/kebijakan-soal-twk-dinilai-timbulkan-ketidakpastian-hukum-dan-ketidakadilan?page=all>, diakses pada 2 Januari 2021 Pukul 15.07 WITA.

<https://news.detik.com/berita/d-4709534/resmi-dpr-sahkan-revisi-uu-kpk-meski-ditolak-habis-habisan>, diakses pada 23 November 2021 Pukul 19.54 WITA.

<https://www.liputan6.com/news/read/4566913/deretan-pro-kontra-pemecatan-51-pegawai-kpk-tak-lolos-twk>, diakses pada 31 Desember 2021 Pukul 16.35 WITA.

<https://tirto.id/dasar-tes-wawasan-kebangsaan-kpk-kronologi-pemecatan-58-pegawai-gj3v>, diakses pada 1 Januari 2022 Pukul 23.19 WITA.

<https://www.antaranews.com/berita/2176270/pakar-tak-setuju-twk-kpk-dibidang-tak-berdasarkan-hukum>, diakses pada 2 Januari 2022 Pukul 16.24 WITA.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5564098/tentang-tes-wawasan-kebangsaan-ujian-buat-pegawai-kpk-untuk-jadi-asn>, diakses pada 17 Maret 2022 Pukul 12.09 WITA.

<https://www.bkn.go.id/berita/pelaksanaan-asesmen-tes-wawasan-kebangsaan-seleksi-pegawai-asn-kpk-sudah-sesuai-prosedur>, diakses pada 17 Maret 2022 Pukul 12.18 WITA.

<https://www.antaraneews.com/berita/2154814/melihat-landasan-hukum-proses-alih-status-pegawai-kpk>, diakses pada 25 Februari 2022 Pukul 11.06 WITA.

<https://news.detik.com/berita/d-5561603/perbandingan-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk-dan-cpns?single=1>, diakses pada 1 Februari 2022 Pukul 12.24 WITA.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210505121817-12-638805/daftar-lengkap-nama-pegawai-kpk-tak-lolos-twk>, diakses pada 19 Maret 2022 Pukul 19.49 WITA.

<https://www.suara.com/news/2019/12/28/131648/5-kasus-besar-yang-ditangani-novel-baswedan-hingga-disiram-air-keras?page=all>, diakses pada 21 Maret 2021 Pukul 23.05 WITA.

<https://www.suara.com/news/2021/05/07/135644/daftar-pertanyaan-tes-alih-status-pegawai-kpk-yang-lecehkan-perempuan>, diakses pada 23 Maret 2022 Pukul 00.26 WITA.

## **MAKALAH**

Mudzakkir. 2011. *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Makalah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.

## **SKRIPSI**

Muhammad Akbar Hakiki. 2018. *Kedudukan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi Putusan Mahkamah*

*Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.* Yogyakarta. Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia.

## **DATA PENDUKUNG**

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, KETERANGAN PERS  
Nomor: 027/HM.00/VIII/2021, 16 Agustus 2021.

## **KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.